



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEWA BARANG MILIK NEGARA  
(Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Bondowoso)**

**TESIS**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Studi Ilmu Administrasi (S2) dan mencapai gelar Magister Sains

Oleh

**Khusnul Arifin**

**NIM 090920101012**

**MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2012**

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda H. Andriasih dan H. Nurudin;
2. Ibunda H. Nurnaini dan H. Achmad Buari;
3. Almamater

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khusnul Arifin

NIM : 090920101012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara (Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Bondowoso)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Agustus 2012

Yang menyatakan,



Khusnul Arifin

NIM 090920101012

**TESIS**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEWA BARANG MILIK NEGARA  
(Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Bondowoso)**

Oleh  
Khusnul Arifin  
NIM 090920101012

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sasongko, M.Si

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis berjudul "Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara (Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Bondowoso) telah disetujui pada :

Hari, tanggal : Jum'at, 10 Agustus 2012

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.

NIP. 19520727 198103 1 003

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Sasongko, M.Si

NIP. 19570407 198609 1 001

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Dr. Akhmad Toha, M.Si

NIP. 19571227 198702 1 001

## PENGESAHAN

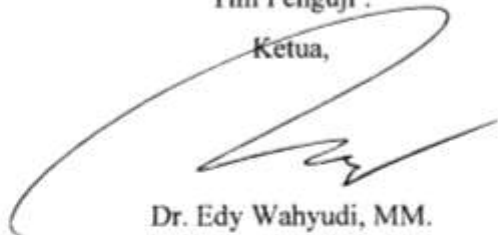
Karya ilmiah Tesis berjudul "Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara (Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Bondowoso) telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Jum'at, 10 Agustus 2012

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji :

Ketua,

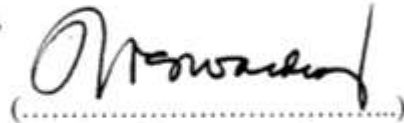


Dr. Edy Wahyudi, MM.

NIP. 19750825 200212 1 002


Anggota Penguji,

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.  
NIP. 19520727 198103 1 003



(.....)

2. Dr. Sasongko, M.Si  
NIP. 19570407 198609 1 001



(.....)

3. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.  
NIP. 19560726 198902 1 001

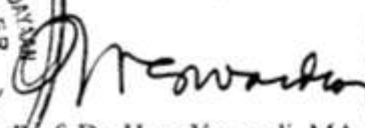


(.....)



Mengesahkan

Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.  
NIP. 19520727 198103 1 003

## RINGKASAN

**Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara (Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Bondowoso);** Khusnul Arifin, 090920101012; 2012 : 104 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi (S2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Perubahan cara pandang terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diawali dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 dan dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 yang mengamanatkan adanya pengelolaan aset negara secara efisien dan efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam mendukung pembangunan nasional. Pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, salah satunya dengan pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bondowoso. Sampai saat ini, Polres Bondowoso telah menyewakan sebagian barang milik negara yang dikuasainya, yaitu berupa pertokoan yang berlokasi di Jalan A. Yani Nomor 71 dan 72 Bondowoso yang terletak di jalan utama poros Jember-Bondowoso dan berupa kantin di Jalan Veteran Nomor 1, dekat dengan pusat kota (dalam lingkungan Kantor Polres Bondowoso).

Tujuan penelitian adalah : (1) mengkaji penerapan prinsip-prinsip *good governance*, manajemen aset dan sistem administrasi dalam implementasi kebijakan sewa barang milik negara di Kepolisian Resor Bondowoso dan (2) mengkaji hal-hal yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi kebijakan sewa barang milik negara di Kepolisian Resor Bondowoso. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, khususnya Kepolisian Resor Bondowoso dalam implementasi sewa barang milik negara. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif yang dilakukan di Kepolisian Resor Bondowoso dengan sumber data yang didapat dari (1) wawancara dengan informan yang dianggap paling mengetahui dan membantu peneliti untuk memperoleh data-data sebanyak delapan informan (2) dokumen berupa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, Surat Perjanjian Sewa, Laporan dinas, dan lain-lain (3) pengamatan dan pencatatan secara langsung di lapangan pada saat penelitian.

Hasil penelitian implementasi kebijakan sewa barang milik negara di Kepolisian Resor Bondowoso menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip utama *good governance* dalam implementasi sewa barang milik negara di Polres Bondowoso yaitu transparansi dan partisipasi belum dilaksanakan dengan baik, namun prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan baik. Kepolisian Resor Bondowoso telah melaksanakan manajemen aset dan sistem administrasi yang baik sesuai dengan kewenangannya sebagai kuasa pengguna barang. Sumber daya manusia di Polres Bondowoso yang memiliki keterampilan untuk melaksanakan administrasi barang milik negara masih terbatas, ditambah lagi dengan tidak adanya dana untuk mengumumkan barang milik negara yang bisa disewakan beserta nilai sewanya berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan sewa barang milik negara. Struktur birokrasi yang tidak efisien yaitu belum adanya pelimpahan wewenang dalam proses sewa barang milik negara dari Polda Jawa Timur kepada Polres Bondowoso mengakibatkan pelaksanaan sewa barang milik negara tidak efektif dan efisien. Namun komunikasi yang baik pada tingkat pelaksana implementasi di pemerintahan dalam pelaksanaan sewa barang milik negara di Kepolisian Resor Bondowoso dan disposisi atau sikap dari pimpinan di dalam organisasi yaitu dari Markas Besar Polri, Polda Jawa Timur dan Kepala Polres Bondowoso yang mendukung implementasi kebijakan sewa barang milik negara di Polres Bondowoso menjadi pendorong keberhasilan implementasi kebijakan.



## SUMMARY

**The Lease Policy Implementation of State Property (Case Study On Bondowoso Police);** Khusnul Arifin, 090 920 101 012; 2012: 104 pages, Administrative Science Program (S2) Faculty of Social and Political Sciences, University of Jember.

A shift in perspective of State Property Management was started by Government Regulation No. 6 of 2006 and followed by Government Regulation No. 38 of 2008 which mandates to manage the state assets efficiently and effectively by applying the principles of good governance to support national development. Management of state assets is run openly and responsible for the people prosperity, one of it is the idle rental property that is acted by Bondowoso Police. Until now, The Bondowoso Police has rented a part of state property which are under their control, those are in shopping centre form located at Jalan A. Yani No. 71 and 72 Bondowoso, on Jember-Bondowoso main road and a canteen, that in located on Jalan Veteran No. 1 Bondowoso (in Bondowoso Police area).

Research objectives are : (1) studying about application of good governance principles, asset management and administration system in lease policy implementation of state property and (2) examining the things that affect the lease policy implementation of state property run by The Bondowoso Police. The results of this study are expected to benefit the government, particularly in the lease policy implementation of The Bondowoso Police asset. I used qualitative research located at The Bondowoso Police Office area, data research was obtained from (1) interviews with eight informants who were considered to know much and help me to obtain the data (2) documents are Government Regulation No. 6 of 2006, Government

Regulation No. 38 of 2008, Regulation of finance ministers No. 96/PMK.06/2007, rental agreement, official report, etc. (3) direct observation and recording in the field.

The research results shows that the main principles implementation of good governance that are transparency and participation have not been implemented well, but the principle of accountability has been implemented properly. The Bondowoso Police has implemented an asset management and administration system well in accordance with its authority as an authorized asset user. Human resources in The Bondowoso Police who have the skills on administration of state property is still limited, more over there was no budget to announce that part of state property can be rented including the prices caused the implementation of the lease policy lesser than optimal. Inefficient bureaucratic structure that was no delegation of authority from The East Java Police to Bondowoso Police led the lease policy implementation to not effective and efficient one. But good communication of the executive level leaders and disposition or attitude of the organization leaders of the National Police, The East Java Police and The Bondowoso Police that are supporting the lease policy implementation of state property run by The Bondowoso Police drives policy implementation in to success.

## **PRAKATA**

Segala puji syukur ke hadirat Allah Swt, sholawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara (Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Bondowoso)” ini disusun guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi (S2) dan mencapai gelar Magister Sains pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian tesis ini, antara lain kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Sasongko, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan tesis ini.
2. Tim Penguji Tesis, yang telah banyak memberikan masukan demi kesempurnaan tesis ini.
3. H. Nurudin dan Hj. Andriasih yang telah memberikan kasih sayang dan doanya.
4. H. Achmad Buari dan Hj. Nurnaini yang telah memberikan semangat dan doanya.
5. Istriku, Nina Christie Yolandari dan anak-anakku Abid Faiz Saladin dan Fatih Afa Sidqi yang telah memberikan semangat, perhatian, kasih sayang dan doanya.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Jember, Agustus 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>PEMBIMBINGAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>SUMMARY</b> .....	ix
<b>PRAKATA</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Perumusan Masalah</b> .....	9
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	10
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
<b>2.1 Implementasi Kebijakan</b> .....	11
<b>2.2 Tata Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)</b> .....	16
<b>2.2.1 Prinsip Akuntabilitas</b> .....	20
<b>2.2.2 Prinsip Transparansi</b> .....	21
<b>2.2.3 Prinsip Partisipasi</b> .....	23
<b>2.3 Manajemen Aset</b> .....	25

2.4 Pentingnya Manajemen Aset .....	27
2.5 Reformasi Manajemen Aset .....	28
2.6 Barang Milik Negara .....	29
2.7 Pemanfaatan Barang Milik Negara .....	31
2.7.1 Sewa .....	32
2.7.2 Pinjam Pakai .....	33
2.7.3 Kerja Sama Pemanfaatan .....	33
2.7.4 Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) .....	34
2.8 Sistem Administrasi Sewa Barang Milik Negara Sebagai Kebijakan Publik .....	34
2.9 Kerangka Pikir Teoritis .....	43
2.10 Penelitian Terdahulu .....	44
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	48
3.2. Fokus Penelitian .....	49
3.3. Sumber Data .....	51
3.4. Penentuan Informan .....	52
3.5. Jenis Data .....	53
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	54
3.7. Metode Analisis Data .....	57
3.8. Keabsahan Data .....	58
<b>BAB 4. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>61</b>
4.1. Gambaran Umum Kepolisian Resort Bondowoso .....	61
4.2. Struktur Organisasi Polres Bondowoso .....	62
4.3. Barang Milik Negara Polres Bondowoso .....	65
4.4. Proses Sewa Barang Milik Negara di Polres Bondowoso .....	67
4.4.1 Inventarisasi dan Revaluasi .....	68

4.4.2	Laporan Barang Milik Negara.....	68
4.4.3	Penetapan Status Penggunaan.....	69
4.4.4	Pemanfaatan .....	70
<b>BAB 5.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
5.1.	Pemanfaatan Barang Milik Negara di Polres Bondowoso .....	73
5.2.	Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Utama <i>Good Governance</i> .....	78
5.2.1	Prinsip Akuntabilitas .....	78
5.2.2	Prinsip Transparansi .....	82
5.2.3	Prinsip Partisipasi .....	86
5.3.	Penerapan Manajemen Aset .....	89
5.4.	Penerapan Sistem Administrasi .....	92
5.5.	Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara .....	94
5.5.1	Komunikasi .....	94
5.5.2	Sumber Daya .....	97
5.5.3	Disposisi Atau Sikap .....	98
5.5.4	Struktur Birokrasi .....	100
<b>BAB 6.</b>	<b>KESIMPULAN IMPLIKASI TEORITIK DAN SARAN .....</b>	<b>104</b>
6.1	Kesimpulan .....	104
6.2	Implikasi Teoritik .....	106
6.3	Saran .....	107
<b>DAFTAR BACAAN</b>	.....	<b>109</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>1. Foto Obyek Sewa Kepolisian Resor Bondowoso .....</b>	<b>116</b>
<b>2. Gambar Lokasi Obyek Sewa .....</b>	<b>117</b>
<b>3. Surat Perjanjian Peminjaman Aset .....</b>	<b>118</b>
<b>4. Surat Keputusan Penunjukan Tim Penilai .....</b>	<b>121</b>
<b>5. Surat Permohonan Ijin Penggunaan Pemanfaatan BMN .....</b>	<b>123</b>
<b>6. Berita Acara Penelitian Fisik dan Administrasi .....</b>	<b>125</b>
<b>7. Surat Persetujuan Sewa .....</b>	<b>128</b>
<b>8. Surat Keputusan Sewa Menyewa Barang Milik Negara .....</b>	<b>129</b>
<b>9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara .....</b>	<b>133</b>